

**ABSTRAK****IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI BENTUK ASAS  
PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners)**

Oleh:  
**Ardan Yuwafi**  
**E1A116006**

Tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan kesalahannya di pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka khususnya tersangka tindak pidana narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah pada penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, *display* data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak-hak tersangka tindak pidana narkoba sebagai asas praduga tak bersalah pada penyidikan Kepolisian Resor Banyumas sebagian besar telah sesuai dengan peraturan. Adapun hak-hak yang memerlukan perhatian lebih lanjut yakni mengenai hak bebas menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan pasifnya peran penasehat hukum pada tahap penyidikan. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak tersangka sebagai asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan antara lain dari substansi hukum yaitu sistem hukum yang masih bersifat *Crime Control Model* yang berimplikasi pada pasifnya peran penasehat hukum pada penyidikan. Struktur hukum yaitu kurangnya profesionalitas Penyidik khususnya dalam mengontrol emosi dan tidak adanya laboratorium forensik di wilayah Polresta Banyumas. Kultur hukum dalam hal ini justru menjadi faktor pendorong yakni kesadaran masyarakat untuk tidak main hakim sendiri serta respon sosial terhadap tindakan Penyidik dapat mendorong Penyidik untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum.

**Kata Kunci** : Implementasi, asas praduga tak bersalah, tindak pidana narkoba.

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF SUSPECT RIGHTS AS PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE INVESTIGATION PROCESS OF CRIMINAL NARCOTICS  
(Studies at the Banyumas Police and Hak & Partners Advocates Office)**

**By:**  
**Ardan Yuwafi**  
**E1A116006**

*The suspect must be presumed innocent until found guilty in court and have obtained permanent legal force. Therefore, law enforcers must continue to respect the rights of suspects, especially suspects in narcotics crimes. The purpose of this study is to determine the implementation of the suspect's rights as a form of presumption of innocence in the investigation of narcotics crime at the Banyumas Police. This research uses qualitative research methods with an empirical juridical approach and descriptive analytical research specifications. The research was conducted at the Banyumas Resos Police and the Office of Advocates for Rights & Partners. The data used include primary data and secondary data. Methods of data collection through interviews and literature study. The data obtained were processed by data reduction, data display, data categorization. Presentation of data in the form of narrative text descriptions, using qualitative analysis methods. The results showed that the implementation of the rights of narcotics crime suspects as the presumption of innocence in the Banyumas Resort Police investigation was largely in accordance with the regulations. As for the rights that require further attention, namely regarding the right to freely convey information without any pressure, the right to get free legal assistance and the passive role of legal advisors at the investigation stage. The factors inhibiting the implementation of the suspect's rights as the presumption of innocence at the investigation stage include the legal substance, namely the legal system which is still a Crime Control Model which implies the passive role of legal advisors in investigations. The legal structure is the lack of professionalism of investigators, especially in controlling emotions and the absence of a forensic laboratory in the Banyumas Police area. The legal culture in this case actually becomes a driving factor, namely public awareness not to take justice into their own hands and the social response to investigators' actions can encourage investigators to act in accordance with the rule of law.*

*Keywords: Implementation, presumption of innocence, narcotics crime.*